

INTEROPERABILITAS TNI ANGKATAN LAUT DENGAN LEMBAGA LAIN MILIK NEGARA DALAM LATIHAN ARMADA JAYA DEMI KESIAPAN MENGHADAPI KEMUNGKINAN OPERASI MILITER PERANG

Ika Hari Wibowo Sadono

Pasis Dikreg Seskoal Angkatan 62 TA. 2023

Email : election_212@yahoo.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i2.175>

Abstrak

Latihan Armada Jaya, merupakan latihan puncak matra laut yang secara rutin dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka mengukur kesiapan seluruh komponen utama pertahanan matra laut. Latihan ini memiliki nilai strategis penting dalam rangka menghadapi berbagai kemungkinan ancaman agresi atas kedaulatan dan keutuhan NKRI. Saat ini kekuatan unsur milik TNI Angkatan Laut sudah cukup mumpuni untuk menggelar Operasi Militer masiv yang disimulasi dalam Latihan Armada Jaya. Akan tetapi, mengingat luas wilayah dan berbagai situasi pertempuran (jika sebuah Operasi Militer Perang terjadi), kekuatan yang dimiliki TNI Angkatan Laut masih dapat diperkuat dengan menggunakan unsur kapal milik lembaga negara di bidang maritim sebagai unsur pendukung. Demi meningkatkan kesiapan unsur kapal pendukung ini, Latihan Armada Jaya yang diselenggarakan secara interoperabilitas dengan komponen maritim lain merupakan hal strategis yang mungkin dieksekusi pelaksanaannya.

Kata Kunci : Latihan Armada Jaya, Interoperabilitas TNI dan Lembaga Negara di bidang Maritim.

Abstract,

Armada Jaya Exercise is the peak exercise of the Navy that is routinely conducted by the Indonesian Navy in order to measure the readiness of all the main components of the maritime defense. This exercise has an important strategic value in order to face various possible threats of aggression against the sovereignty and integrity of the Republic of Indonesia. Currently, the strength of the elements belonging to the Indonesian Navy is sufficient to carry out massive Military Operations that are simulated in the Armada Jaya Exercise. However, considering the vast area and various battle situations (if a Military War Operation occurs), the strength of the Indonesian Navy can still be strengthened by using elements of ships belonging to state institutions in the maritime sector as supporting elements. In order to improve the readiness of these supporting ship elements, the Armada Jaya Exercise which is held in an interoperable manner with other maritime components is a strategic thing that may be executed.

Keywords: *Armada Jaya Training, Interoperability of the TNI and State Institutions in the Maritime Sector.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terluas di dunia, Indonesia senantiasa rentan terhadap upaya disintegrasi sebagian wilayahnya akibat berbagai kepentingan. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, lepas dari pangkuan pertwi atas keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 yang menyerahkan keduanya kepada Malaysia (sekarang menjadi bagian Negara Bagian Sabah) setelah 33 tahun menjadi sengketa (Ardhyamathanino dan Ningsih, 2022). Selain itu, disintegrasi Provinsi Timor Timur yang sekarang menjadi Negara Timor Leste di akhir tahun 90-an (Arisanti, 2022). Hal ini terjadi akibat lemahnya posisi Indonesia secara politis atas wilayah-wilayah dimaksud. Terkait masalah kewilayahan, dengan posisi sebagai negara kepulauan, banyak batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga berbentuk perairan dengan pulau terluar sebagai penanda batasnya.

Secara umum saat ini berbagai masalah batas wilayah di perairan telah berhasil dituntaskan pemerintah melalui perundingan bi/tri lateral dengan negara-negara tetangga yang berkepentingan dilanjutkan ratifikasi melalui Undang-undang. Akan tetapi, hingga saat ini beberapa wilayah perairan Indonesia masih rentan atas ancaman disintegrasi misalnya di sebagian Laut Natuna Utara (Kepulauan

Riau) dan Blok Ambalat (Antara Laut Sulawesi dan Selat Makassar). Untuk itu, TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan utama pertahanan matra laut harus senantiasa menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan ancaman disintegrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini merupakan Tugas Pokok TNI Angkatan Laut seperti termaktub dalam Pasal 9 Huruf (a) Undang-undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Karenanya TNI Angkatan Laut senantiasa melakukan latihan bertingkat dan berjenjang dengan latihan puncak matra laut adalah Latihan Armada Jaya.

Institusi dan/atau Lembaga negara merupakan bagian dari pemerintah dimana tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dengan tegas dalam undang-Undang. TNI Angkatan Laut sendiri merupakan bagian dari lembaga negara dalam hal ini unsur pertahanan. Sesuai dengan amanat UU, setiap lembaga negara memiliki hak dan kewajiban mendukung setiap upaya pertahanan negara dalam sistem pertahanan semesta (Pasal 1 Angka (3) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara). Selain TNI Angkatan Laut beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan terkait keamanan di perairan antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)-Dirjen PKSDP, Badan

Keamanan Laut (Bakamla), POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018). Karena tugas dan tanggungjawabnya, lembaga diatas memiliki sumber daya hingga alat berupa kapal dengan berbagai tipe dan ukuran disesuaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Ketika negara membutuhkan, alat yang dimiliki lembaga-lembaga negara diatas (selain TNI Angkatan Laut) dapat menjadi unsur perbantuan dibawah TNI Angkatan Laut dalam upaya pertahanan negara matra laut. Untuk itu, menjadi sebuah hal yang dapat difikirkan, apabila mereka (lembaga negara non TNI Angkatan Laut yang memiliki kewenangan diperairan) dapat dilibatkan dalam Latihan Armada Jaya demi meningkatkan kesiapan seluruh elemen serta sumber daya negara bidang maritim ketika negara membutuhkan.

METODOLOGI

Interoperabilitas antara TNI dan lembaga-lembaga milik negara yang memiliki kewenangan di bidang maritim, adalah suatu konsep perkuatan unsur armada dalam sebuah Operasi Militer

Perang-OMP ketika diperlukan. Penelitian atas upaya perkuatan melalui latihan Armada Jaya dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif analitik dengan data primer adalah aturan perundangan dan referensi lain dilengkapi data sekunder dari literatur, naskah hingga jurnal yang terkait. Selanjutnya dilakukan tabulasi masalah dan dibahas agar pada akhir naskah diperoleh kesimpulan penelitian.

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (UNCLOS-1982). Gugus kepulauan dengan 17.504 pulau, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. wilayah negeri ini kaya akan sumber daya diseluruh wilayah. Hal ini mengundang pihak asing untuk memilikinya.

Nine Dash Line (NDL). NDL merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Tiongkok. NDL membentang sejauh 2.000 km dari daratan Tiongkok di Asia daratan ke arah Laut China Selatan (LCS) melingkupi wilayah seluas hampir 2 jt Km² dengan batas terluar melanggar banyak teretorial wilayah laut negara lain seperti Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Vietnam.

NDL dilaporkan pertama kali muncul di peta negara China pada 1947, setelah Perang Dunia II. Bagi Indonesia, klaim ini azasinya tidak masuk ke wilayah perairan teritorial. Namun, NDL China bersinggungan dengan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Utara Kepulauan Natuna. Meski hanya bagian kecil jika dibandingkan luasnya Kepulauan Nusantara, klaim ini berdampak pada hilangnya perairan Indonesia pada ZEEI seluas lebih kurang 83.000 km² atau 30 % dari luas laut Indonesia di Natuna Utara (Adhi, 2021).

Blok Ambalat. Wilayah yang terletak diantara Selat Makassar dan Laut Sulawesi ini diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Meski Blok ini saat ini secara aktif dieksplorasi oleh Indonesia, Malaysia belum berhenti mengajukan klaim atasnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara kita dengan Malaysia khususnya di Blok Ambalat.

Azasinya, Indonesia dan Malaysia pernah sepakat dan menandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen pada 27 Oktober 1969 yang diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah

Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Hal ini menyebabkan pemerintahan Indonesia menolak peta baru Malaysia tersebut. Tak hanya Indonesia, peta tersebut juga diprotes oleh Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam (harruma, 2022).

TNI Angkatan Laut adalah kekuatan utama pertahanan negara matra laut. Saat ini memiliki kekuatan sekurangnya 242 unsur KRI (Kapal perang Republik Indonesia) dengan rincian 208 merupakan kapal tempur dengan berbagai ukuran (mulai dari kapal patroli, korvet hingga fregat), 4 unsur Kapal Selam dan 30 Unsur Amfibi (Arbar, 2022). Ketika mobilisasi harus dilakukan menghadapi agresi militer asing yang memiliki kekuatan lebih besar, jumlah kekuatan milik TNI Angkatan Laut kemungkinan masih belum memenuhi kebutuhan (tergantung kekuatan yang dihadapi). TNI Angkatan Laut sendiri secara rutin melaksanakan latihan secara berjenjang, bertingkat dan sinambung secara matra hingga gabungan dengan matra lain dibawah naung Mabes TNI. Untuk latihan matra tertinggi saat ini, TNI Angkatan Laut melaksanakan Latihan Armada Jaya. Demi mensiasati kekurangan

kekuatan (terutama unsur kapal), maka kapal milik lembaga negara lain dapat di Bawah Komando Operasi (BKO) kepada TNI Angkatan Laut ketika dibutuhkan.

Tiongkok. Sejak pertengahan tahun 90-an Tiongkok bangkit membuka diri kepada dunia. Saat ini PDB Tiongkok mencapai U\$ 15,6 Triliun (2021) hampir menyamai Amerika (U\$ 23,3 Triliun)-berdasarkan *Index channel.com*. Seandainya tidak terjadi pandemi *Covid-19* diakhir tahun 2019 hingga akhir tahun 2022 bisa saja saat ini PDB Tiongkok lebih besar dari Amerika Serikat. PDB atau Produk Domestik Bruto adalah nilai total dari upaya.usaha ekonomi yang dilakukan oleh sebuah negara. Secara sederhana, PDB merupakan angka total jumlah barang/jasa yang dihasilkan seluruh unit ekonomi negara (BPS, 2021). Meski PDB-nya sedikit dibawah Amerika Serikat, kekayaan bersih Tiongkok saat ini sudah menjadi nomor satu di dunia.

Perkembangan ekonomi ini diiringi perkembangan kekuatan militer secara kuantitas dan kualitas. Dari seluruh aspek kemiliteran (Ketiga matra) Tiongkok bangkit menjadi kekuatan terbesar di dunia. Dari sisi Angkatan Laut, keunggulan Amerika Serikat (Kekuatan tradisional Angkatan Laut terbesar di dunia pasca Perang Dunia II) atas Tiongkok hanya pada jumlah

kekuatan Armada Kapal Induk. Diluar itu, Tiongkok saat ini jauh lebih unggul.

Kekuatan Angkatan Laut Tiongkok saat ini minimal 557 unsur tempur. 2 kapal induk (dalam waktu dekat bertambah 1 buah yang terbesar dan tercanggih-Fujian tipe 003), dengan unsur pendukung berupa 36 *destroyer* (kapal perusak), 52 fregat, 50 korvet dan 74 Kapal selam (Widodo, 2020). kapal induk terbesar Fujian (Tipe 003), saat ini telah diresmikan. Data kekuatan Angkatan Laut China dihadirkan disini karena Indonesia negara kepulauan. Ketika ancaman agresi muncul atas Indonesia, maka ancaman ini akan menggunakan kekuatan laut sebagai unsur pemukul utama.

Selain Angkatan Laut kekuatan Angkatan Darat Tiongkok saat ini terbesar di dunia dengan 2 juta tentara aktif. Kekuatan ini mengungguli 2 kekuatan tradisional Amerika Serikat (1,39 jt) dan Russia 850.000 tentara aktif (Anwar, 2022). Kekuatan besar ini didukung ratusan jet tempur canggih dan rudal-rudal jelajah antar benua. Klaim wilayah Tiongkok tentu menjadi sebuah perhatian besar untuk TNI.

Malaysia, meski merupakan negara serumpun dan bersahabat dengan Indonesia, hingga saat ini tidak berhenti menunjukkan minatnya pada wilayah milik

Indonesia dalam hal ini Blok Ambalat. Pada 16 Februari 2005, Malaysia dengan gagah memberi konsesi minyak kepada Shell (Perusahaan minyak patungan Inggris dan Belanda) pada sebagian Blok Ambalat dilanjutkan secara aktif kapal-kapal mereka (Malaysia) melakukan patroli hingga pelanggaran batas wilayah perairan milik Indonesia. *Tentera Laut Diraja Malaysia* disingkat *TLDM*, merupakan kekuatan pertahanan matra laut nomor 3 terbesar di Kawasan Asia Tenggara setelah Thailand dan Indonesia. Memiliki kekuatan armada sekurangnya 82 kapal aktif dengan personel diperkirakan 18.000 (IISS,2023) dengan kekuatan utama 3 Fregate, 6 korvet dan 2 kapal selam. Yang menjadi perhatian adalah kapal selam Malaysia, Kapal Diraja (KD) Tun Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak merupakan kapal selam tercanggih di Kawasan Asia Tenggara (Dari situs *Naval Technology* dilansir oleh CNN Indonesia).

Kapal selam produk kerjasama galangan kapal Perancis dan Spanyol kesenjataan selain umumnya torpedo, dilengkapi dengan *Rudal Khan*. Rudal yang mampu bekerja secara independen menggunakan sistem *Global Positioning System* (GPS) + *Global Navigation Satellite System* (GNSS) *Aided* dan *Inertial Navigation System* (INS) yang membuat akurasi serangan hingga kurang dari 10

meter. Rudal canggih yang dikembangkan perusahaan Roketsan dari negara Turki ini memiliki jangkauan hingga 250 km (Turkish Defense News, 2024). Selain itu, kapal selam ini memiliki kesenjataan anti-kapal selam dan anti-misil permukaan dengan proses loading senjata otomatis (CNN Indonesia, 2022).

April tahun 2005, terjadi gesekan yang hampir memicu konflik senjata ketika KD Rencong harus diusir dengan cara di serempet oleh KRI Tedong Naga-819 (8 April). Hal yang menyebabkan Panglima TNI mengeluarkan Surat Keputusan tegas pada tanggal 21 April 2005 yang bunyinya TNI-AL hanya boleh melepaskan tembakan jika AL atau pihak lain (aparat) dari Malaysia lebih dahulu menembak (Kusumadewi, 2015). Keputusan ini adalah larangan menembak, akan tetapi maknanya, TNI-AL harus siap bertempur ketika ada ancaman nyata. Selama periode 2005, Indonesia mencatat upaya pelanggaran wilayah oleh Malaysia di perairan Kalimantan Utara (termasuk Blok Ambalat) mencapai 35 kali.

Tahun 2007, kembali Malaysia melakukan provokasi aktif 24-25 Februari, kapal-kapal milik Tentara Diraja Malaysia kembembali berulah. Tercatat, KD Budiman melakukan penerobosan wilayah perairan hingga 1 mil (pukul 10.00 WITA). Diikuti KD

Sri Perlis menjelang senja sejauh 2 mil. Kali ini mereka diusir oleh KRI Welang-808 yang tengah berpatroli. Esok harinya (tanggal 25 Februari), KD Sri Perlis kembali melakukan provokasi wilayah, masuk sejauh 3.000 yard pada hari (09.00 WITA) dan berhadapan dengan KRI Untung Soeropati-372 sesaat setelah KD Sri Perlis diusir, sebuah Pesawat Patroli Malaysia kembali melakukan ulah provokatif. Akibat ulah Malaysia, ditahun itu TNI-AL menyiagakan 4 unsur yang berpatroli secara bergantian di area yang di Klaim Malaysia (KRI Ki Hajar Dewantara-364, KRI Untung Suropati-372, KRI Welang-808, dan KRI Keris-624).

Tahun 2009, selama 1 semester awal, Malaysia melakukan pelanggaran wilayah hingga 13 kali. Hal yang membuat KSAL kala itu, Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno memperkuat unsur kekuatan dengan menerjunkan Pasukan Marinir di Ambalat disamping KRI yang secara kontinyu berpatroli bergantian. Sikap KSAL sejalan dengan Menteri Sekretariat Negara yang kala itu dijabat oleh Hatta Rajasa yang secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan pernah melepaskan Ambalat meski sejenak (1 Juni 2009). Hal ini adalah bentuk ketegasan Pemerintah Indonesia dan tidak berfikir membawa masalah Ambalat ke Mahkamah Internasional karena berdasarkan fakta

historis dan Konvensi Hukum Laut secara kuat menyatakan kebenaran posisi Indonesia (Kusumadewi, 2015).

Upaya pelanggaran terus dilakukan Malaysia dan Indonesia tidak pernah berhenti melayangkan Nota Diplomasi ketika hal ini terjadi. Nota ini sangat penting sebagai bentuk pernyataan kedaulatan oleh Indonesia atas apa yang coba diupaya Malaysia. Hal ini ditegaskan oleh Mayor Jendral (Mayjen) TNI Fuad Basya selaku Kepala Pusat Penerangan TNI tahun 2015 dimana intinya beliau menyampaikan bahwa nota protes sangat penting dilayangkan ketika terjadi sebuah insiden pelanggaran wilayah kedaulatan (Pratama, 2015).

Demi kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk akibat agresi kekuatan asing, TNI Angkatan Laut senantiasa melaksanakan latihan berjenjang dan bertingkat serta berkelanjutan dengan Latihan Armada Jaya sebagai latihan puncak matra laut. Latihan ini merupakan simulasi latihan parsial dari Latihan Gabungan (Latgab) TNI yang diselenggarakan secara lengkap mulai tahapan Gladi Posko hingga Gladi Lapangan.

Dalam Latihan Armada Jaya, disimulasi bahwa Presiden RI

mengeluarkan perintah pembentukan Komando Gabungan (Kogab) TNI akibat agresi yang dilakukan negara asing terhadap sebagian wilayah Indonesia. Pasca mandat yang bersifat direktif ini Mabes TNI (dalam Armada Jaya disimulasi adalah Mabes TNI Angkatan Laut) segera menyusun organisasi Kogab TNI yang dipimpin seorang Perwira Tinggi TNI berpangkat minimal Jenderal dengan pangkat Bintang Tiga. Dalam Latihan Armada Jaya, jenderal ditunjuk adalah seorang Perwira Tinggi setingkat Laksamana TNI atau Jenderal Marinir berpangkat minimal Bintang Dua.

Selanjutnya, Pangkogab akan membentuk Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) TNI sebagai Komando pelaksana giat Kampanye Militer Perang atau Operasi Militer Perang (OMP). Masing-masing melaksanakan tugas operasi sesuai dengan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan Kogab. Penyusunan masing-masing Kogasgab dalam Latihan Armada Jaya mengacu pada ketetapan Panglima TNI, dimana Komando Tugas Gabungan ini terdiri dari Kogasgab Udara (Kogasudgab), Kogasgab Laut (Kogaslagab), Kogasgab Amfibi (Kogasfibgab), Kogasgab Lintas Udara (Kogasgabinud), Kogasgab Pendaratan Administrasi (Kogasgabradmin), Kogasgab Darat (Kogasratgab), dan Kogasgab

Pertahanan Pantai (Kogasgabantai). Selain itu juga, dibentuk 1 buah komando tugas sebagai unsur pendukung yaitu Kogasgab dukungan (Kogasgabduk) yang diperkuat oleh 15 jenis satgasduk (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/258/IV/2013 tentang Doktrin Operasi Gabungan TNI).

Secara umum, organisasi latihan dalam Latihan Armada Jaya dibagi menjadi 2 tahap, gladi posko dan gladi lapangan. Gladi posko atau lazim disebut Latihan Pos Komando (Latposko) merupakan latihan penyusunan dan pengambilan keputusan terkait apa yang harus dilakukan menghadapi agresi asing atas wilayah Indonesia yang mengancam kedaulatan serta keutuhan wilayah NKRI. Latposko dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu terbatas dengan harapan setiap personel terlibat mampu melaksanakan tugas penyiapan segala hal terkait Operasi Militer Perang secara cepat, lugas dan tepat. Setelah pelaksanaan Gladi Posko kegiatan latihan dilanjutkan dengan Gladi Lapangan (Manuver Lapangan-manlap). Tujuan kegiatan ini adalah mempraktekkan secara riil dilapangan hal atau apa saja yang telah diputuskan dalam Latposko.

Latihan Armada Jaya membuat TNI Angkatan Laut siap melaksanakan OMP

ketika diperlukan. Selanjutnya, Laksamana TNI Muhammad Ali (Kepala Staf TNI Angkatan Laut) menyatakan dalam Latihan Armada Jaya terkini (Latihan Armada Jaya XLI tahun 2023) bahwa selain mencapai kesiapan dimaksud, Latihan Armada Jaya sangat penting dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit. Akibat terhalangnya latihan pada saat pandemi Covid-19, Latihan Armada Jaya tahun 2023 dilaksanakan TNI Angkatan Laut dengan massif dimana Latihan ini melibatkan 18 kapal perang, 41 kendaraan tempur (ranpur), hingga 5.900 prajurit. KSAL menambahkan, TNI Angkatan Laut bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kesiapan tempur laut yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pembinaan kemampuan material dan personel pengawak alutsista, sebagai bagian penting dari upaya membangun TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh (Irawan, 2023).

Unsur kapal milik lembaga negara non TNI Angkatan Laut. Saat ini lebih dari 100 unsur kapal milik lembaga negara memiliki kemampuan patroli keamanan laut. Secara dimensi, banyak diantaranya berukuran mendekati korvet bahkan KN Tanjung Datu 1101 milik Bakamla berdimensi mencapai fregat ringan dengan kekuatan utama meriam 30 mm. Kepolisian

perairan, diantara 21 kapal patroli milik kepolisian, 10 diantaranya memiliki dimensi 48 meter mendekati ukuran kapal perang kelas korvet (korvet modern Korvet berdimensi 55-128 meter dengan bobot 500 sampai dengan 3.000 Ton), (Munaf dan Sulistyanyingtyas, 2015). Bakamla RI, saat ini memiliki kapal utama sejumlah 10 unit dengan 6 diantaranya memiliki dimensi minimal 48 meter dengan KN Tanjung Datu 1101 yang terbesar (110 meter); KN. Pulau Nipah 8001, KN. Pulau Marore 8002, dan KN. Pulau Dana 8003 (masing-masing 80 meter); KN. Ular Laut 4805 dan KN Belut Laut 4806 (48 meter). Kapal-kapal Bakamla memiliki kemampuan sonar yang sangat bermanfaat dalam menghadapi rintangan bawah air. Kementerian Kelautan dan Perikanan-KKP, memiliki kapal patrol berbagai tipe dengan kelompok terbesar berupa Orcha 5 dan Orcha 6 (berdimensi 63.37 meter) diikuti Orcha 1 sampai dengan 4 (60 meter), Nahwawi (2021).

Ditjen Perhubungan Laut memiliki sekurangnya 19 kapal patrol berukuran minimal 52 meter yang terbagi dalam 3 kelompok, masing-masing; KN Bacan, KN Yefyus, KN Miangas, KN De brill, KN Maratua, KN Miang Besar, KN Kunyit, KN Bimasakti Utama, KN Nipa, KN Nilam, KN Masalembo, KN Edam (60 meter), KN Pradanawa, KN Alphard, KN Andromeda,

KN Mithuna, KN Alnilam, KN Prajapati dan KN Kumba (52 meter), dari situs Dephub (2021). Ditjen Bea Cukai dengan BC 60001 dan BC 60002 (60 meter). Dari kesemua kapal diatas, total minimal TNI Angkatan Laut dapat memanfaatkan minimal 48 unsur untuk di BKO ketika negara membutuhkan demi mendukung OMP.

Pemerintah menyadari, salah satu hal fundamental terkait pemberdayaan seluruh elemen negara sebagai komponen pendukung, perlu dipupuk dan dibumikan. Karenanya Presiden Joko Widodo (Presiden RI saat ini) menelurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2018 tentang bela negara. Dalam inpres ini segenap kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah wajib melaksanakan Aksi Nasional Bela Negara secara sistematis, terstruktur, standar dan masif. Menurut Alm. Doni Munardo (Letnan Jendral TNI Purn.) saat beliau menjabat sebagai Sekretaris Jendral Dewan Ketahanan Nasional (Sekjen Wantanas), "Aksi Nasional Bela Negara ini, tidak melulu dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi, kegiatan ini diwujudkan dalam tataran aksi implementatif di dalam program kerja masing-masing lembaga yang tersebut di atas dengan ruang lingkup yang holistik bagi seluruh elemen bangsa, demi

mengantisipasi ancaman multi dimensional dalam kehidupan bernegara" (Wantanas, 2018).

Interoperabilitas TNI Angkatan Laut dengan Lembaga Negara sektor Maritim pada Latihan Armada Jaya. Saat ini kekuatan unsur TNI Angkatan Laut sudah lebih dari cukup dalam mendukung Latihan. Akan tetapi ketika riil mobilisasi dilaksanakan, jumlahnya masih belum cukup memadai. Untuk itu perlu dipertimbangkan upaya interoperabilitas latihan dengan lembaga negara sektor maritim yang memiliki kemampuan tertentu. Kapal-kapal milik lembaga dimaksud saat ini memiliki kemampuan patroli dan dapat ditingkatkan kemampuan tempurnya apabila ditingkatkan sistem kesenjataannya. Kapal-kapal itu (milik lembaga negara non TNI Angkatan Laut) dapat menjadi lebih efektif pola operasinya apabila memahami laju gerak operasi atau manuver lapangan apabila dilatihkan.

Secara operasional tempur, kapal-kapal ini dapat berfungsi sebagai unsur tabir pada misalnya Kogasgabratmin dimana penguasaan laut telah dimiliki. Beberapa, seperti misalnya kapal Bakamla bahkan dapat berfungsi sebagai unsurintai dengan kemampuan sonarnya dapat bergabung di Kogasgabfib. Beberapa waktu kebelakang hal ini sudah coba dilaksanakan

oleh Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) yang bertanggung jawab dalam bidang angkut militer pada latihan parsial pendaratan administrasi-Latopsratmin dengan melibatkan beberapa kapal patroli milik KPLP-Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Unsur maritim Bea Cukai dan Bakamla-Badan Keamanan Laut. Apa yang telah dilakukan Kolinlamil dalam Latopsratmin merupakan hal mendasar terkait keterlibatan unsur pemerintah lain non militer dalam sebuah latihan. Hal ini, sebaiknya dikembangkan ketingkat lebih kompleks di latgab (Mimbar Maritim, 2021).

Mereka, unsur milik lembaga negara non TNI Angkatan Laut perlu secara bertahap dan kontinyu dilibatkan dalam Latihan Armada Jaya. Mengapa? Karena pergerakan lintas laut kondisi perang dan damai sangat jauh berbeda. Diperlukan manuver-manuver tertentu yang harus dilatihkan, hal yang tidak pernah dilakukan oleh armada kapal non-militer. Pelaksanaan Latihan Armada Jaya secara interoperabilitas dengan lembaga-lembaga dimaksud akan menambah kemampuan (minimal) pengetahuan para awak kapal untuk mendukung sebuah OMP jika dibutuhkan.

KESIMPULAN

Latihan Armada Jaya merupakan latihan yang nilai kepentingan pelaksanaannya sangat tinggi demi mengukur kemampuan TNI Angkatan Laut selaku garda pertahanan utama matra laut menghadapi beragam bentuk ancaman, gangguan hingga upaya disintegrasi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Pelaksanaan latihan secara interoperabilitas dengan unsur kapal milik lembaga negara non TNI Angkatan Laut akan membuat lembaga ini (TNI Angkatan Laut) memiliki kekuatan cadangan tambahan apabila dalam situasi sesungguhnya negara memerlukan sebuah Operasi Militer Perang. ***Jalesveva Jayamahe***

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, A.S. (2021). Apa Itu Nine Dash Line yang Sering Dipakai China untuk Klaim Natuna?. Blog Kompas, diakses 28 Februari 2023
- Adryamarthanino, V dan Ningsih, W. L. 2022, Penyebab Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Tangan Malaysia, diakses 6 Februari 2024
- Ahmad, N.M (2023). 3 Matra TNI Akan Melaksanakan Latihan Gabungan, Panglima Yudo Ukur Kemampuan

- Alutsista. Kompas News.com, diakses 3 Maret 2023
- Anwar, L. S. (2022). Kekuatan Militer China Berkembang Drastis Dalam Satu Dekade. Blog Kompas, diakses 3 Maret 2023.
- Arisanti, B.M. (2022). Kenapa Timor Leste Memisahkan Diri dari Indonesia? Blog Populis, diakses 2 Maret 2023
- Bari, F (2019) Latgab TNI di Situbondo 2019 Membanggakan, Diawali Heningkan Cipta bagi BJ Habibie. Factualnews.com, diakses 3 Maret 2023
- Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, (2018). Pembinaan Bela Negara
- Hakim, S. (2022). TNI Angkatan Laut dan PT Pelnis Perkuat Kerja Sama Pengamanan Pelayaran. Antara news.com, 23 April 2022, diakses 20 April 2023
- Harruma, I. 2022, Kasus Ambalat: Kronologi dan Penyelesaiannya, Kompas.com, diakses 6 Februari 2024
- Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, Penegakan Hukum di Laut Indonesia, Fakultas HUKUM UI, diakses 6 Februari 2024
- Index channel.com (2021). PDB Negara-negara di Dunia. Index Channel.com, diakses 30 Januari 2023.
- International Institute for Strategic Studies, 2023, The Military Balance 2023. London: Taylor & Francis, London ISBN 1000910709
- Irawan, G. 2023, KSAL: Unsur yang Terlibat dalam Armada Jaya Akan Lakukan Gladi Bersih Sebelum Ikuti Latgab TNI, Tribunnews.com, diakses 6 Februari 2024
- Kusumadewi, A. 2015. Sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malaysia di Ambalat. CNN Indonesia, 17 Jun 2015, diakses 28 Maret 2023
- Lembar Negara Republik Indonesia, (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Lembar Negara Republik Indonesia, (2004). Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Markas Besar TNI, (2013). Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/258/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Doktrin Operasi Gabungan TNI, 2013.
- Munaf, D. R. dan Sulistyanyingtyas, T. 2015, Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan,

Jurnal Sositologi volume 14 nomor 3, desember 2015.

Nahwawi, M. N. 2021, Mengenal Tipe dan Jenis Kapal Pengawas Perikanan, kumparan.com, diakses 7 Februari 2024.

Novitasari, C.N. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, diakses 2 Maret 2023.

Pratama, A.B. 2015. Dibayangi Jet Malaysia, Ambalat Dicemaskan TNI Lepas dari RI. CNN Indonesia, 17 Juni

2015, diakses 28 Maret 2023.

Presiden Republik Indonesia, (2018). Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2018 tentang Bela Negara.

Prihastomo, W. W. (2020). Menakar kekuatan angkatan laut Tiongkok versus AS, siapa yang lebih unggul? Kontan.co.id, diakses 1 Maret 2023.

Redaksi CNN Indonesia,2022, Spesifikasi Kapal Selam Scorpene dan Rudal Khan yang akan Dibeli RI, CnnIndonesia.news, diakses 6 Februari 2024, pukul 22.10 WIB.

Turkish Defence News, 2024, Rudal Balistik KHAN, Turkishdefencenews.com, diakses 6 Februari 2024.